



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AZWANDI**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **180303**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.665.000.000**

1. Tanah Seluas 304 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 305 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 965.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 858 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA
BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 211.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO 1.2 RS CVT Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 143.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX 155 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	766.997.107
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.642.997.107
III. HUTANG	Rp.	501.931.572
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.141.065.535

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.